



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024
DI SUKADANA**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
DI BANDAR LAMPUNG**

Nomor : 23 A/LHP/XVIII.BLP/05/2025
Tanggal : 23 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024
DI SUKADANA**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
DI BANDAR LAMPUNG**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 terdiri dari dua laporan yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan ini memuat:

- a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Laporan ini memuat:

- a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN...	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.....	3
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 27B/LHP/XVIII.BLP/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 23 Mei 2025
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

 **Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan, //**



**Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., Ak., CA, CSFA, ACPA
Register Negara Akuntan No. RNA-15561**

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang memiliki 51 Organisasi Perangkat Daerah.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2024;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2024;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, Laporan Perubahan SAL, dan LAK untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LO dan LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;

- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk Sistem Pengendalian Intern (SPI) terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberi komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 55 hari, terdiri dari pemeriksaan interim selama 25 hari mulai 17 Februari s.d. 13 Maret 2025 dan pemeriksaan terinci selama 30 hari mulai tanggal 9 April s.d. 8 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 8/ST/XVIII.BLP/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 dan Nomor 41/ST/XVIII.BLP/03/2025 tanggal 27 Maret 2025.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
AUDITED



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2024



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sukadana, 23 Mei 2025


ELA SITI NURYAMAH

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagai implementasi peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2024 yang merupakan salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, sehat, akuntabel dan transparan.

Dalam Laporan Keuangan ini disajikan Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, dimana realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp2.337.112.000.417,93 atau sebesar 94,46% dari anggaran sebesar Rp2.474.303.330.401,00. Realisasi belanja adalah sebesar Rp2.309.190.574.317,60 atau 90,20% dari anggaran sebesar Rp2.559.987.749.455,00.

Menurut Neraca per 31 Desember 2024 jumlah aset Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp2.430.842.669.030,81 dan pada Tahun 2023 sebesar Rp2.237.938.166.408,95 terdapat kenaikan sebesar Rp192.904.502.621,86 atau 8,62%..

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan informasi lengkap dan detail terhadap hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan dan menguraikan kebijakan akuntansi serta pos-pos Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kabupaten Lampung Timur.

Demikian kami sampaikan, semoga Laporan Keuangan Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pada tahun-tahun yang akan datang dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak- pihak yang berkepentingan.

Sukadana, 23 Mei 2025
BUPATI LAMPUNG TIMUR

ELA SITI NURYAMAH

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN.....	ii
SURAT REFRESENTASI MANAJEMEN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR TABEL	ix
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	x
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	xi
NERACA.....	xii
LAPORAN OPERASIONAL.....	xiii
LAPORAN ARUS KAS.....	xiv
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xv
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	16
1.1 Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan	17
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Pelaporan Keuangan	18
1.3 Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan	20
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	21
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	21
2.2 Gambaran Ekonomi Makro.....	27
2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	36
2.4 Strategi Pencapaian.....	40
2.5 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	41
2.6 Mandatory Spanding	43
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	46
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	46
3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.....	53 46
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	54

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	54
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan....	54
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan..	55
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah.....	56
BAB V PENJELASAN POS- POS LAPORAN KEUANGAN.....	64
5.1 Laporan Realisasi Anggaran.....	64
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL).....	153
5.3 Neraca.....	154
5.4 Laporan Operasional.....	195
5.5 Laporan Arus Kas.....	225
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas.....	231
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....	235
6.1 Kegiatan Pokok Entitas.....	235
6.2 Informasi Tambahan.....	239
BAB VII PENUTUP.....	249

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Peta Wilayah Administratif Kabupaten Lampung Timur
- Gambar 2 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 s.d 2023
- Gambar 3 : Struktur Perekonomian Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 s.d 2023
- Gambar 4 : Komposisi Aset Tetap Per 31 Desember 2024

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 2.1 : Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional
- Grafik 2.2 : Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024
- Grafik 2.3 : Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional
- Grafik 2.4 : Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023
- Grafik 2.5 : Indeks Pembangunan Manusia Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional
- Grafik 2.6 : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024
- Grafik 2.7 : Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional
- Grafik 2.8 : Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024
Lampiran 2	Kas Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024
Lampiran 3	Kas Bendahara BLUD Per 31 Desember 2024
Lampiran 4	Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember 2024
Lampiran 5	Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2024
Lampiran 6	Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran 7	Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran 8	Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Per 31 Desember 2024
Lampiran 9	Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang DBH Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2024
Lampiran 10	Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang DBH Pajak Pemerintah Provinsi Per 31 Desember 2024
Lampiran 11	Daftar Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024
Lampiran 12	Daftar Persediaan Per 31 Desember 2024
Lampiran 13	Daftar Penyertaan Modal Daerah Tahun Buku 2024
Lampiran 14	Daftar Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024
Lampiran 15	Daftar Masa Manfaat Aset Tetap
Lampiran 16	Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024
Lampiran 17	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024
Lampiran 18	Daftar Utang Belanja Per 31 Desember 2024
Lampiran 19	Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Profil Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur
Tabel 2	: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) 2019 - 2023
Tabel 3	: Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2019- 2023
Tabel 4	: Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (2010-100) di Kabupaten Lampung Timur, 2019 - 2023
Tabel 5	: PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Timur (rupiah) 2019 sd 2023
Tabel 6	: Perubahan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Lampung Timur TA. 2024
Tabel 7	: Mandatory Spending Tahun Anggaran 2024
Tabel 8	: Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024
Tabel 9	: Perhitungan Penyisihan Piutang Tahun 2024
Tabel 10	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 11	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 12	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 13	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 14	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran/Katering Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 15	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Pagelaran Kesenian /Musik/Tari/Busana Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 16	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 17	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 18	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 19	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 20	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 21	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi Bangunan dan Pendesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Tabel 22	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak BPHTB Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 23	:	Anggaran dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 24	:	Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 25	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 26	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 27	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 28	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 29	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 30	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 31	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 32	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 33	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 34	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 35	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 36	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 37	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 38	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 39	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asung (TKA) Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 40	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 41	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 42	:	Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 43	:	Anggaran dan Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Tabel 44	:	Anggaran dan Realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 45	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 46	:	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 47	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 48	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 49	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 50	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 51	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 52	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 53	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 54	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 55	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 56	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 57	:	Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 58	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 59	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 60	:	Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 61	:	Anggaran dan Realisasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 62	:	Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 63	:	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SAH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 64	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 65	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 66	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 67	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 68	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Tabel 69	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 70	:	Anggaran Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 71	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 72	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 73	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 74	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 75	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 76	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 77	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 78	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 79	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 80	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 81	:	Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 82	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 83	:	Anggaran dan Realisasi Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 84	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 85	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) PNSD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 86	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 87	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Honorarium Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 88	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Pengelolaan BMD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 89	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 90	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Tabel 91	: Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 92	: Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 93	: Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 94	: Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 95	: Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 96	: Anggaran dan Realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 97	: Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 98	: Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 99	: Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran jaminan Kematian KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 100	: Anggaran dan Realisasi Belanja dan Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 101	: Anggaran dan Realisasi Belanja BLUD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 102	: Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 103	: Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 dan 2023
Tabel 104	: Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2024 dan 2023
Tabel 105	: Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 106	: Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 107	: Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 108	: Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 109	: Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 110	: Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 111	: Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 112	: Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 113	: Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 114	: Anggaran dan Realisasi Belanja Konsultasi Non Kontruksi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

- Tabel 115 : Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 116 : Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan pelatihan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 117 : Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 118 : Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 119 : Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 120 : Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 121 : Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 122 : Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023
- Tabel 123 : Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Jaringan, Irigasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 124 : Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 125 : Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 126 : Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan Kepada Pihak ketiga/Pihak lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 127 : Anggaran dan Realisasi Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 128 : Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 129 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 130 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 131 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 132 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 133 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 134 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 135 : Realisasi Belanja Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 136 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan 2023

- Tabel 137 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan Tahun 2024 dan 2023
- Tabel 138 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 139 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 140 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat social kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 141 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 142 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 143 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah BOS Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 144 : Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024
- Tabel 145 : Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP Tahun Anggaran 2024
- Tabel 146 : Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 147 : Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 148 : Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 149 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 150 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 151 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 152 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 153 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar Darat Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 154 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bantu Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 155 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 156 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 157 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun Anggaran 2024 dan 2023

- Tabel 158 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 159 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pengolahan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 160 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 161 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 162 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 163 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 164 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 165 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 166 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Komunikasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 167 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 168 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 169 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 170 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 171 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 172 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 173 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 174 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer Unit Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 175 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 176 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 177 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pelindung Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 178 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 179 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Tahun Anggaran 2024 dan 2023

- Tabel 180 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 181 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 182 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 183 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 184 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 185 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 186 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 187 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 188 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jembatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 189 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 190 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 191 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Kotor Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 192 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 193 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 194 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 195 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 196 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 197 : Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 198 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 199 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 200 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 201 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Tahun Anggaran 2024 dan 2023

- Tabel 202 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 203 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 204 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 205 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 206 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 207 : Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun 2024
- Tabel 208 : Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 209 : Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 210 : Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 211 : Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 212 : Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 213 : Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 214 : Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 215 : Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 216 : Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 217 : Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 218 : Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 219 : Rincian SiLPA Periode s.d 31 Desember 2024
- Tabel 220 : Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 dan 2023
- Tabel 221 : Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 dan 2023
- Tabel 222 : Rincian Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 223 : Rincian Aset pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 224 : Rincian Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 225 : Kas di Kas Daerah per 30 Desember 2024
- Tabel 226 : Pembatasan Penggunaan Kas pada Kas Daerah
- Tabel 227 : Rincian Kas di BLUD Tahun Anggaran 2024

Tabel 228	: Rincian Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 229	: Mutasi Piutang Pajak Hotel
Tabel 230	: Mutasi Piutang Pajak Restoran
Tabel 231	: Mutasi Piutang Pajak Katering
Tabel 232	: Mutasi Piutang Pajak Hiburan
Tabel 233	: Mutasi Piutang Pajak Reklame Billboard
Tabel 234	: Mutasi Piutang Pajak Kain
Tabel 235	: Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum
Tabel 236	: Mutasi Piutang Pajak Parkir
Tabel 237	: Mutasi Piutang Pajak Air Tanah
Tabel 238	: Mutasi Piutang Pajak MBLB
Tabel 239	: Mutasi PBB Perkotaan dan Perdesaan
Tabel 240	: Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2024
Tabel 241	: Rincian Piutang Transfer Antar Daerah-Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 242	: Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah-Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2024
Tabel 243	: Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2024
Tabel 244	: Rincian Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dan 2023
Tabel 245	: Rincian Persediaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 246	: Daftar Obat Daluarsa Per 31 Desember 2024
Tabel 247	: Daftar Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dan 2023
Tabel 248	: Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPRS Lampung Timur TA. 2024
Tabel 249	: Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PDAM Way Guruh Lampung Timur TA. 2024
Tabel 250	: Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2024
Tabel 251	: Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2024
Tabel 252	: Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024
Tabel 253	: Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024
Tabel 254	: Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024
Tabel 255	: Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024
Tabel 256	: Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024
Tabel 257	: Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember Tahun 2024
Tabel 258	: Aset Lainnya per 31 Desember 2024
Tabel 259	: Rincian TPTGR Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang per 31 Desember 2024
Tabel 260	: Aset Lain-lain per 31 Desember 2024
Tabel 261	: Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

Tabel 262	:	Rincian Kewajiban per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023
Tabel 263	:	Rincian Pendapatan yang Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023
Tabel 264	:	Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023
Tabel 265	:	Rincian Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 266	:	Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 267	:	Rincian Utang Belanja Hibah Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 268	:	Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 269	:	Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 270	:	Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 271	:	Rincian Utang Belanja Bantuan Keuangan Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 272	:	Rincian Pendapatan Operasional-LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 273	:	Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 274	:	Rincian Pendapatan Pajak Daerah LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 275	:	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 276	:	Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 277	:	Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 278	:	Rincian Pendapatan Transfer-LO per per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 279	:	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO per per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 280	:	Rincian Pendapatan Transfer Umum Dana Bagi Hasil-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024
Tabel 281	:	Rincian Dana Alokasi Umum-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024
Tabel 282	:	Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024

- Tabel 283 : Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024
- Tabel 284 : Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024
- Tabel 285 : Rincian Pendapatan Daerah yang Sah-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024
- Tabel 286 : Rincian Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah-LO per 31 Desember 2024
- Tabel 287 : Rincian Beban -LO Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2023
- Tabel 288 : Rincian Beban Operasi -LO Per per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
- Tabel 289 : Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
- Tabel 290 : Rincian Beban Barang dan Jasa-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024
- Tabel 291 : Rincian Beban Barang-LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
- Tabel 292 : Rincian Beban Jasa -LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
- Tabel 293 : Rincian Beban Pemeliharaan – LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
- Tabel 294 : Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
- Tabel 295 : Rincian Beban Uang dan/Jasa Untuk di berikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
- Tabel 296 : Rincian Beban Barang dan Jasa BOS per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
- Tabel 297 : Rincian Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
- Tabel 298 : Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
- Tabel 299 : Rincian Beban Hibah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
- Tabel 300 : Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
- Tabel 301 : Rincian Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
- Tabel 302 : Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
- Tabel 303 : Rincian Beban Bagi Hasil Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024

- Tabel 304 : Rincian Beban Bantuan Keuangan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
- Tabel 305 : Rincian Beban Tidak Terduga Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024
- Tabel 306 : Rincian Beban Tidak Terduga Tahun 2024
- Tabel 307 : Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
- Tabel 308 : Beban Luar Biasa Tahun 2024
- Tabel 309 : Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
- Tabel 310 : Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
- Tabel 311 : Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
- Tabel 312 : Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
- Tabel 313 : Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
- Tabel 314 : Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
- Tabel 315 : Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
- Tabel 316 : Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
- Tabel 317 : Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
- Tabel 318 : Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
- Tabel 319 : Uraian Saldo Kas Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
- Tabel 320 : Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2024
- Tabel 321 : Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023
- Tabel 322 : Daftar Bupati yang Menjabat di Kabupaten Lampung Timur
- Tabel 323 : Perubahan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur
- Tabel 324 : Data Jumlah ASN Tahun 2020 -2025
- Tabel 325 : Daftar Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Periode 2024 s.d 2029
- Tabel 326 : Daftar Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan yang Diterbitkan Tahun 2024
- Tabel 327 : Laporan Rencana Penggunaan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Penggajian PPPK
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024
- Tabel 328 : Realisasi DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Timur Anggaran 2024

- Tabel 329 : Realisasi DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Anggaran 2024
- Tabel 330 : Laporan Realisasi DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Anggaran 2024
- Tabel 331 : Perubahan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1.				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1.	87,870,000,000.00	83,550,226,924.00	95.08	83,816,436,780.30
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2.	5,626,300,000.00	3,749,508,473.00	66.64	4,704,579,364.00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3.	11,600,000,000.00	3,304,913,365.59	27.83	3,020,927,854.18
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4.	122,960,355,257.00	117,062,925,324.58	95.20	104,594,294,929.90
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)		228,056,655,257.00	207,567,574,087.17	91.02	196,136,238,928.38
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2.				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.2.1.	2,076,296,357,000.00	1,999,880,925,177.00	96.32	1,826,894,762,966.00
10	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1.	1,788,597,656,000.00	1,728,318,848,377.00	96.63	1,557,560,248,866.00
11	Dana Transfer Umum -DBH	5.1.1.2.1.1.1.	136,756,006,000.00	88,946,258,000.00	65.04	75,432,109,191.00
12	Dana Alokasi Umum - DAU	5.1.1.2.1.1.2.	1,183,258,184,000.00	1,193,360,241,000.00	94.55	1,077,274,703,452.00
13	Dana Alokasi Khusus DAK Fisik	5.1.1.2.1.1.3.	115,686,990,000.00	112,366,030,326.00	97.13	61,763,625,193.00
14	Dana Alokasi Khusus DAK Non Fisik	5.1.1.2.1.1.4.	352,896,476,000.00	333,646,319,051.00	94.55	343,089,811,030.00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA		287,698,701,000.00	271,562,076,800.00		
16	Dana Desa	5.1.1.2.1.2.	272,698,701,000.00	271,562,076,800.00	0.00	-
17	Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.3.	15,000,000,000.00		0.00	269,334,514,100.00
18	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2.	169,200,318,144.00	129,591,067,479.00	76.59	108,632,101,105.00
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		169,200,318,144.00	129,591,067,479.00	76.59	108,632,101,105.00
20	Jumlah Pendapatan Transfer		2,245,496,675,144.00	2,129,471,992,656.00	94.83	1,935,526,864,071.00
21	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3.				
22	Pendapatan Hibah		750,000,000.00	72,433,674.76	9.66	-
23	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		750,000,000.00	72,433,674.76	9.66	0.00
24	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2,474,303,330,401.00	2,337,112,000,417.93	94.46	2,131,663,102,999.38
25	BELANJA DAERAH	5.1.2.				
26	BELANJA OPERASI	5.1.2.1.				
27	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	931,016,278,263.00	877,743,801,240.51	94.28	819,359,372,551.67
28	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	529,144,338,263.00	461,577,506,441.49	87.23	445,583,187,092.82
29	Belanja Hibah	5.1.2.1.3.	283,526,070,668.00	241,174,866,230.90	85.08	234,335,347,242.48
30	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4.	3,156,775,675.00	2,442,292,220.00	77.37	3,354,771,769.00
31	Jumlah Belanja Operasi		1,749,843,512,869.00	1,582,938,466,132.90	90.62	1,502,632,678,655.97
32	BELANJA MODAL	5.1.2.2.				
33	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1.	250,000,000.00		0.00	
34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.	41,202,728,382.00	34,779,530,896.00	84.41	21,093,974,539.00
35	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	98,368,382,366.00	90,778,537,780.46	92.28	67,753,207,114.85
36	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4.	228,771,494,743.00	182,535,782,693.24	79.79	87,181,542,397.87
37	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	15,392,730,120.00	12,706,720,188.00	82.55	12,813,646,335.00
38	Jumlah Belanja Modal		383,985,335,511.00	320,800,571,557.70	83.55	188,842,370,386.72
39	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3.				
40	Belanja Tak Terduga		8,550,000,000.00	4,913,057,922.00	57.46	34,370,000.00
41	Jumlah Belanja Tak terduga		8,550,000,000.00	4,913,057,922.00	57.46	34,370,000.00
42	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4.				
43	Belanja Bagi Hasil Pajak	5.1.2.4.1.	19,026,308,089.00	6,849,470,000.00	36.00	-
44	Belanja Bagi Hasil Retribusi	5.1.2.4.2.	1,261,118,586.00	562,630,000.00	44.61	-
45	Belanja Bantuan Keuangan		400,321,474,400.00	393,126,378,705.00	98.20	404,681,881,795.00
46	Jumlah Belanja Transfer		420,688,901,075.00	400,538,478,705.00	95.23	404,681,881,795.00
47	JUMLAH BELANJA		2,559,987,749,455.00	2,309,190,574,317.60	90.20	2,096,191,300,837.69
48	SURPLUS/ (DEFISIT)	5.1.3.	(85,684,419,054.00)	27,921,426,100.33		35,471,802,161.69
49	PEMBIAYAAN	5.1.4.				
50	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1.				
51	Penggunaan SILPA		87,684,419,054.00	87,541,900,803.05	99.84	54,212,616,892.36
52	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0.00	(142,518,251.00)	100.00	(69,300,014.00)
53	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2.	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00	2,000,000,000.00

7

NO	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
			2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00	2,000,000,000.00
59	Pengeluaran Penyertaan Modal					
60	FEMBIAYAAN NETTO		85,684,419,054.00	85,541,900,803.05	99.83	52,212,616,892.36
61	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	-	113,463,326,903.38	0.00	87,684,419,054.05

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	CATATAN	TA. 2024	TA. 2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		87,684,419,054.05	54,281,916,906.36
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		87,541,900,803.05	54,212,616,892.36
3	Sub Total (1-2)		142,518,251.00	69,300,014.00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		113,463,326,903.38	87,684,419,054.05
5	Sub Total (3+4)		113,605,845,154.38	87,753,719,068.05
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		(142,518,251.00)	(69,300,014.00)
7	Lain-lain			
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	5.2.	113,463,326,903.38	87,684,419,054.05

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan


BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ELA SITINURYAMAH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	CATATAN	2024	2023
1	ASET			
2	ASET LANCAR	5.3.1.1.		
3	Kas dan Setara Kas		113,596,271,923.38	87,686,028,054.05
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	104,138,173,903.41	78,785,824,279.59
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	142.00	564,000.00
7	Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	5.3.1.1.4	2,163,411,044.97	3,131,902,932.46
	Kas Lainnya	5.3.1.1.5	132,945,020.00	-
8	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.6	184,900.00	1,971,500.00
9	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.7	7,161,556,913.00	5,765,765,342.00
12	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.8	14,606,556,892.75	14,204,168,747.50
13	Piutang Restribusi Daerah	5.3.1.1.9	7,959,000.00	16,297,000.00
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.10	9,062,303,841.00	12,375,720,278.87
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.11	-	730,903,920.00
16	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.12	89,860,770,643.00	90,134,222,739.00
17	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.13	(9,666,818,798.13)	(12,874,651,536.79)
18	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.14	217,068,678.08	44,864,166.67
19	Persediaan	5.3.1.1.15	123,301,559,552.55	103,034,222,219.08
20	JUMLAH ASET LANCAR		340,985,671,732.63	295,351,775,588.38
21	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2.		
22	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1		
23	Investasi kepada BUMN		-	-
24	Investasi kepada BUMD		-	-
25	Investasi kepada Obligasi		-	-
26	Dana Bergulir		-	-
27	Deposito Jangka Panjang		-	-
28	Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
29	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		-	-
30	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
31	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		42,565,942,464.22	35,224,930,995.25
32	Investasi Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
33	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		42,565,942,464.22	35,224,930,995.25
34	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		42,565,942,464.22	35,224,930,995.25
35	ASET TETAP	5.3.1.3		
36	Tanah	5.3.1.3.1	270,707,978,009.01	415,564,367,475.93
37	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	625,812,172,055.94	620,044,340,042.35
38	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	916,734,465,880.89	823,533,023,900.59
39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1,812,772,236,097.67	1,867,349,753,998.65
40	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	14,619,376,590.19	25,846,314,575.19
41	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	59,505,374,588.28	58,447,735,006.19
42	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2,025,951,060,527.76)	(2,088,455,343,114.77)
43	JUMLAH ASET TETAP		1,674,200,542,694.22	1,722,330,191,884.13
44	DANA CADANGAN			
45	Dana Cadangan		-	-
46	JUMLAH DANA CADANGAN		-	-
47	ASET LAINNYA	5.3.1.4.		
48	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	77,092,500.00	87,012,500.00
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.1	-	-
50	Aset Tidak Berwujud		-	-
51	Aset Lain-lain	5.3.1.4.2	656,579,281,837.24	180,487,654,371.38
52	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(284,743,175,197.50)	(30,403,624,930.19)
53	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.3	1,177,313,000.00	34,860,226,000.00
54	JUMLAH ASET LAINNYA		373,090,512,139.74	185,031,267,941.19
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI		-	-
55	JUMLAH ASET		2,430,842,669,030.81	2,237,938,166,408.95

24

No.	URAIAN	CATATAN	2024	2023
56	KEWAJIBAN	5.3.2		
57	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1.		
58	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		132,945,020.00	-
59	Utang Bunga			-
60	Utang Pinjaman Jangka Pendek			-
61	Bgian Lancar Utang Jangka Panjang			
62	Pendapatan Diterima Dimuka		546,210,693.58	518,825,873.25
63	Utang Belanja		131,068,069,773.34	130,501,393,393.60
64	Utang Jangka Pendek Lainnya			-
65	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		131,747,225,486.92	131,020,219,266.85
66	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2.		
67	Utang kepada Pemerintah Pusat		-	-
68	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
69	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
70	Utang kepada Masyarakat		-	-
71	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
72	JUMLAH KEWAJIBAN		131,747,225,486.92	131,020,219,266.85
73	EKUITAS			
74	EKUITAS		2,299,095,443,543.89	2,106,917,947,142.10
75	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2,430,842,669,030.81	2,237,938,166,408.95

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ELA SITI NURYAMAH

7



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO URUT	URAIAN	CATATAN	2024	2023
1	KEGIATAN OPERASIONAL			
2	PENDAPATAN - LO	5.4.1		
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1		
4	Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	83,925,230,248.92	85,649,132,647.65
5	Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	3,749,508,473.00	4,544,072,864.00
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	4,506,324,834.56	7,139,243,910.19
7	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	110,377,130,089.50	105,440,830,411.77
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		202,558,193,645.98	202,773,279,833.61
9	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2		
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	5.4.1.2.1		
11	Dana Perimbangan		1,694,530,893,377.00	1,576,767,508,337.00
12	Dana Bagi Hasil DBH-LO	5.4.1.2.1.1	55,158,303,000.00	94,639,368,662.00
13	Dana Alokasi Umum - DAU-LO	5.4.1.2.1.6	1,193,360,241,000.00	1,077,274,703,452.00
14	Dana Alokasi Khusus - DAK Fisik-LO	5.4.1.2.1.7	112,366,030,326.00	61,763,625,193.00
15	Dana Alokasi Khusus - DAK Non Fisik-LO	5.4.1.2.1.7	333,646,319,051.00	343,089,811,030.00
16	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	5.4.1.2.1.8		0.00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (10 s/d 15)		1,694,530,893,377.00	1,576,767,508,337.00
18	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.2		
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		127,776,638,818.00	186,948,392,490.00
20	Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah (18)		127,776,638,818.00	186,948,392,490.00
21	Jumlah Pendapatan Transfer (16 + 18)		1,822,307,532,195.00	1,763,715,900,827.00
22	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3		
23	Pendapatan Hibah		9,520,714,446.19	53,112,010,569.84
24	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan			0.00
25	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (22 s/d 23)		9,520,714,446.19	53,112,010,569.84
26	Jumlah Pendapatan (7 + 20 + 24)		2,034,386,440,287.17	2,019,601,191,230.45
27	BEBAN-LO	5.4.2		
28	Beban Operasi			
29	Beban Pegawai	5.4.2.1	879,683,811,468.59	823,167,847,861.67
30	Beban Barang	5.4.2.2	87,987,833,427.50	105,764,659,076.34
31	Beban Jasa	5.4.2.3	148,887,352,748.82	175,658,571,385.18
32	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	11,189,314,527.00	9,792,360,175.00
33	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	30,492,462,786.00	33,439,714,452.00
34	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.4.2.6	2,847,648,996.00	4,372,214,400.00
35	Beban Barang dan Jasa BOS	5.4.2.7	79,965,200,662.00	81,383,261,965.00
36	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.4.2.8	19,012,644,259.00	21,115,406,658.00
37	Beban Barang dan Jasa BLUD	5.4.2.9	68,463,914,252.46	79,821,151,988.79
38	Beban Hibah	5.4.2.10	232,562,174,822.16	156,797,250,342.83
39	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.11	2,442,292,220.00	3,354,771,769.00
40	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.13	1,372,960,925.16	3,934,287,832.62
41	Jumlah Beban Operasi		1,564,907,611,094.69	1,498,601,497,906.43
42	Beban Penyusutan dan Amortisasi			
43	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.12	572,837,785,362.08	182,639,533,393.36
44	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		572,837,785,362.08	182,639,533,393.36
45	Beban Transfer			
46	Beban Bagi Hasil	5.4.2.16	8,736,341,964.13	8,845,733,190.00
47	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.17	128,066,891,555.00	122,435,708,020.00
48	Jumlah Beban Transfer		136,803,233,519.13	131,281,441,210.00
49	Beban Tidak Terduga			
50	Beban Tidak Terduga		4,913,057,922.00	0.00
51	Jumlah Beban Tidak Terduga		4,913,057,922.00	0.00

NO URUT	URAIAN	CATATAN	2024	2023
45	Jumlah Beban Daerah (27 s/d 44)		2,279,461,687,897.90	1,812,522,472,509.79
46	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (25 - 45)		(245,075,247,610.73)	207,078,718,720.66
47	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3.		
48	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		59,606,760.00	40,927,786.00
49	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
50	Defisit Penjualan Aset Nonlancar			(59,104,750.00)
51	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
52	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO			
53	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO			
54	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (48 s/d 53)		59,606,760.00	(18,176,964.00)
55	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (46 + 54)		(245,015,640,850.73)	207,060,541,756.66
56	POS LUAR BIASA	5.4.4.		
57	Pendapatan Luar Biasa			
58	Beban Luar Biasa			34,370,000.00
59	POS LUAR BIASA (57-58)		-	(34,370,000.00)
60	SURPLUS/DEFISIT-LO (55 + 59)	5.4.5.	(245,015,640,850.73)	207,026,171,756.66

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2024	2023
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	<i>Arus Kas Masuk</i>	<i>5.5.1.1</i>		
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA		83,550,226,924.00	83,816,436,780.30
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		3,749,508,473.00	4,704,579,364.00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		3,204,913,365.59	3,020,927,854.18
6	Lain-lain PA D yang Sah		117,062,925,324.58	104,594,294,929.90
7	Dana Perimbangan		1,728,318,848,377.00	1,557,560,248,866.00
8	Dana Insentif Daerah		271,562,076,800.00	-
9	Dana Desa		-	269,334,514,100.00
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA		129,591,067,479.00	108,632,101,105.00
11	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		72,433,674.76	-
12	Jumlah Arus Kas Masuk		2,337,112,000,417.93	2,131,663,102,999.38
13	<i>Arus Kas Keluar</i>	<i>5.5.1.2</i>		
14	Belanja Pegawai		877,743,801,240.51	819,359,372,551.67
15	Belanja Barang dan Jasa		461,577,506,441.49	445,583,187,092.82
16	Belanja Hibah		241,174,866,230.90	234,335,347,242.48
17	Belanja Bantuan Sosial		2,442,292,220.00	3,354,771,769.00
18	Belanja Tak Terduga		4,913,057,922.00	34,370,000.00
19	Transfer Bagi Hasil Pendapatan		7,412,100,000.00	-
20	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		393,126,378,705.00	404,681,881,795.00
21	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		-	-
22	Jumlah Arus Kas Keluar		1,988,390,002,759.90	1,907,348,930,450.97
23	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (12-23)	5.5.1.3.	348,721,997,658.03	224,314,172,548.41
24	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
25	<i>Arus Kas Masuk</i>	<i>5.5.2.1.</i>		
26	Penjualan Aset Tetap			
27	Jumlah Arus Kas Masuk			
28	<i>Arus Kas Keluar</i>	<i>5.5.2.2.</i>		
29	Belanja Modal Tanah			
30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		34,779,530,896.00	21,093,974,539.00
31	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		90,778,537,780.46	67,753,207,114.85
32	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		182,535,782,693.24	87,181,542,397.87
33	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		12,706,720,188.00	12,813,646,335.00
35	Jumlah Arus Kas Keluar		320,800,571,557.70	188,842,370,386.72
36	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (28-36)		(320,800,571,557.70)	(188,842,370,386.72)
37	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
38	<i>Arus Kas Masuk</i>			
39	Penyertaan Modal			
40	Jumlah Arus Kas Masuk			
41	<i>Arus Kas Keluar</i>			
42	Penyertaan Modal		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
43	Jumlah Arus Kas Keluar		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
44	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (40-43)		(2,000,000,000.00)	(2,000,000,000.00)
45	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.		
46	<i>Arus Kas Masuk</i>	<i>5.5.4.1.</i>		
47	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		86,540,429,940.32	135,361,838,099.00
48	Uang Kiriman			
49	Jumlah Arus Kas Masuk		86,540,429,940.32	135,361,838,099.00

NO	URAIAN	CATATAN	2024	2023
50	<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.4.2.		
	<i>Koreksi SiLPA</i>		142,518,251.00	69,300,014.00
51	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		86,407,484,920.32	135,361,838,099.00
52	Uang Kiriman		1,609,000.00	33,426,400.00
53	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		86,551,612,171.32	135,464,564,513.00
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (41-44)		(11,182,231.00)	(102,726,414.00)
55	Kenaikan / (Penurunan) Kas (24+37+45)		25,910,243,869.33	35,369,075,747.69
56	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		87,686,028,054.05	54,316,952,306.36
57	Koreksi Kas		-	-
58	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di JKN dan Kas di BOS		113,596,271,923.38	89,686,028,054.05
59	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		104,138,173,903.41	78,785,824,279.59
60	Koreksi Kas			
61	Kas di BLUD		2,163,411,044.97	3,131,902,932.46
62	Kas Lainnya		132,945,020.00	
63	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
64	Kas di Bendahara Pengeluaran		142.00	564,000.00
65	Kas di Bendahara BOS		184,900.00	1,971,500.00
66	Kas BOK Puskesmas		7,161,556,913.00	5,765,765,342.00
67	Setara Kas/salah posting bank		-	-
68	Saldo Akhir Kas	5.5.5.	113,596,271,923.38	87,686,028,054.05

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan



 BUPATI LAMPUNG TIMUR,



 ELA SITI NURYAMAH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2024	2023
1	Ekuitas Awal		2,106,917,947,142.10	1,900,311,182,101.56
2	Surplus/Defisit LO		(245,015,640,850.73)	207,026,171,756.66
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : Koreksi Ekuitas		437,193,137,252.52	(419,406,716.12)
	Ekuitas Akhir	5.6	2,299,095,443,543.89	2,106,917,947,142.10

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan


BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ELA SITI NURYAMAH

28